

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu negara baik negara maju maupun negara berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan penduduknya dilakukan melalui proses pembangunan. Pembangunan merupakan syarat mutlak bagi kelangsungan hidup suatu negara. Menciptakan pembangunan yang berkesinambungan adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh sebuah negara dengan tujuan untuk menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk dapat menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat, umur panjang dan menjalankan kehidupan yang produktif. Pembangunan manusia merupakan isu yang sangat penting. Kualitas sumber daya manusia yang baik merupakan modal dasar pembangunan suatu negara. Dengan SDM yang berkualitas, perekonomian suatu negara bisa berkembang secara optimal dan mampu bersaing dengan negara-negara lain ditingkat global.

Dalam proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang akan lebih menekankan arti penting akumulasi modal fisik. Sekarang makin disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia yaitu “proses peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara”. Dalam kata-kata Galbraith, “sebagian besar

pertumbuhan industri yang kita peroleh sekarang ini bukan diperoleh dari investasi modal yang lebih besar tetapi dari investasi pada manusia”¹.

Salah satu peran pemerintah dalam mendorong kesejahteraan yaitu peran alokatif. Dengan peran ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada agar optimal dan efisien. Bentuk nyatanya adalah pemerintah mempunyai kewenangan besar dalam hal pengelolaan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengaturan kinerja ekonomi melalui mekanisme penerimaan dan pengeluaran pemerintah². Sebagaimana bahwa cakupan fiskal ini sangat luas, maka apabila dikaitkan dengan penelitian ini fiskal yang dimaksud adalah pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dalam hal ini diarahkan pada parameter yang sudah menjadi parameter internasional dalam hal kesejahteraan yaitu Indeks Pembangunan Manusia.

Dalam ilmu ekonomi sektor pendidikan dan kesehatan telah diyakini telah memainkan peran yang vital dalam pembangunan. Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan tingkat pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan

¹ M.L. Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.415

² Zaini Ibrahim, *Pengantar Ekonomi Makro*, (Serang: Baraka Aksara, 2017), h.155

dan pendidikan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital atau yang dikenal sebagai input fungsi produksi agregat. Pemerintah mempunyai peran dari indeks pembangunan manusia yaitu dengan meningkatkan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dapat membantu meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri³. Kebijakan fiskal pemerintah ini diharapkan mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo periode tahun 2015-2019, pemerintah menetapkan suatu kebijakan bernama Program Indonesia Pintar (PIP). Pelaksanaan PIP juga tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dalam rangka mencapai target-target di bidang pendidikan.

Untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dapat dicapai melalui peningkatan pendidikan, kesehatan dan pendapatan. Jika seseorang memiliki pendapatan yang lebih besar maka orang tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selain hanya untuk memenuhi kebutuhan primernya seperti sandang, pangan dan papan, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan lain seperti kesehatan dan pendidikan.

³ Alison Jeackline Lawrence Heka, Agnes Lopian, Imelda Lajuck, "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Kesehatan dan Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Sulawesi Utara". *Jurnal, Universitas Ratulangi Manado*, 2017, h.208

Pendapatan yang dimaksud adalah pendapatan per kapita⁴. Pendapatan per kapita juga mencerminkan tingkat daya beli penduduk di suatu daerah, dengan semakin besarnya pendapatan maka semakin besar pula pengeluarannya. Pendapatan per kapita sering menjadi tolak ukur kesejahteraan suatu Negara atau daerah. Pendapatan per kapita merupakan pendapatan rata-rata penduduk per kapita (tiap orang) dalam suatu negara atau wilayah⁵.

Pada tahun 2010, UNDP mencatat beberapa negara yang mengalami kemajuan tercepat dalam meningkatkan IPM. Pada periode 1970-2010 Indonesia termasuk dalam *World's Top Movers in HDI Improvement*. Pada tahun 2012 IPM Indonesia berada pada peringkat 121 dari 187 negara. Kemudian pada tahun 2013 mengalami kenaikan peringkat dari tahun sebelumnya, yaitu peringkat ke 108 dari 187 negara. Indonesia di tataran negara ASEAN berada pada peringkat 6 dan termasuk dalam kategori menengah. Pada tahun 2017 Indonesia menempati peringkat ke enam dalam tataran negara ASEAN. Untuk mengetahui perkembangan IPM Indonesia, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan serta pendapatan per kapita dapat dilihat pada Tabel 1.1.

⁴ Hadi Sasana, "Pengaruh Belanja Pemerintah Daerah Dan Pendapatan Perkapita Terhadap Indeks Pembangunan Manusia", Jurnal, UNDP, 2012, h.3

⁵ Kartika Sari, *Ruang Lingkup Ekonomi Makro*, (Klaten: Cempaka Putih, 2019), h.38

Tabel 1.1**IPM Indonesia, Anggaran Pendidikan, Anggaran Kesehatan****Dan Pendapatan Per Kapita Tahun 2010 -2018**

Tahun	Nilai IPM (%)	Anggaran Pendidikan (Miliar Rupiah)	Anggaran Kesehatan (Miliar Rupiah)	Pendapatan Per kapita (Rupiah)
2010	66.53	216,721.9	29,893.2	28.011.889,4
2011	67.09	258,347.2	36,094.0	31.467.462,6
2012	67.70	297,365.1	40,618.9	34.114.310,8
2013	68.31	332,184.1	46,308.4	40.447.621,9
2014	68.90	353,388.1	59,585.0	40.494.688,5
2015	69.55	390,279.0	69,331.6	43.664.153,2
2016	70.18	370,810.2	92,758.6	46.333.552,0
2017	70,81	406,102.0	92,166.0	50.196.103,9
2018	71.39	431,733.4	109,037.8	54.251.126,8

Sumber: BPS dan Kemenkeu

Tabel 1.1 memperlihatkan perkembangan Indeks Pembangunan Manusia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain ditandai dengan peningkatan level IPM, perkembangan Indonesia juga terlihat dari status perkembangan manusia. Sejak tahun 2018, Indonesia telah memasuki pembangunan manusia dengan status tinggi. Begitupula dengan kondisi saat ini, capaian pembangunan manusia yang sudah mencapai 71,39 menunjukkan bahwa

Indonesia telah berstatus tinggi dalam pencapaian pembangunan manusia.

Begitupun dengan pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita, setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun pada tahun 2017 anggaran kesehatan turun dari tahun sebelumnya (2016) dari 92,758.6 miliar rupiah menjadi 92,166.0 miliar rupiah. Akan tetapi hal ini tidak mengganggu pada nilai IPM. Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sistem pendidikan dan kesehatan agar pengembangan sumber daya manusia tanah air terus membaik.

Bagaimanapun juga perbaikan tersebut patut untuk diapresiasi. Namun tidak boleh membuat jadi berbangga diri. Bukan berarti dengan naiknya angka IPM ini berarti sudah tercapai dan tak ada yang perlu dievaluasi. Evaluasi mutlak diperlukan agar terjadi peningkatan yang signifikan. Jika dibandingkan dengan negara yang ada di ASEAN Indonesia masih tergolong rendah.

Tabel 1.2

IPM Negara-Negara ASEAN Tahun 2017

Negara	HDI (%)	AHH (%)	HLS (%)	RLS (%)	PNB Per Kapita (Rp)	RANK
Singapore	0,932	83,2	16,2	11,5	82,503	8
Brunei Darussalam	0,853	77,3	14,5	9.1	76.427	40

Malaysia	0.802	75.5	13.7	10.2	26.107	57
Thailand	0.755	75.5	14.7	7.6	15.516	86
Philippines	0.699	69.2	12.6	9.3	9.154	111
Indonesia	0.694	69.4	12.8	8.0	10.846	115
Vietnam	0.694	76.5	12.7	8.2	5.859	116
Loa People's Democratic Republic	0.601	67,0	11.2	5.2	6.070	137
Cambodia	0.582	69.3	11.7	4.8	3.413	146
Myanmar	0.578	66.7	10.0	4.9	5.567	147

Sumber: UNDP, Human Development Repotr, 2018

Berdasarkan data dari *Human Development Report* (HDR), dengan data terakhir tahun 2017, Indonesia masih menempati urutan ke enam (6) di bawah Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina dengan perolehan nilai IPM 0,694. Angka harapan hidup Indonesia yaitu 69,4. Artinya penduduk Indonesia rata-rata hidup selama 69,4 tahun. Sedangkan negara ASEAN yang menempati posisi teratas yaitu negara Singapura dengan nilai IPM 0,932 dan menempati ranking ke delapan dunia. Di posisi paling bawah yaitu Myanmar dengan nilai IPM 0,578 dan ranking 147 dunia. Diantara sepuluh negara yang bergabung di ASEAN, Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia telah berstatus “sangat tinggi”. Sementara itu, Thailand telah berstatus “tinggi”. Indonesia bersama Filipina, Vietnam, Laos, dan Myanmar masih berstatus “sedang”. Hal ini bisa terjadi karena

pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Pengeluaran pemerintah untuk alokasi pendidikan dan kesehatan harus benar-benar teralokasikan karena dengan hal tersebut akan meningkatkan kualitas SDM yang akan meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dan karena pengeluaran pemerintah sebesar 20% tidak dialokasikan semuanya untuk pendidikan tetapi juga dialokasikan untuk hal lainnya, seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya.

Dari data ini kita melihat bahwa kinerja IPM Indonesia masih perlu banyak perbaikan. Negara masih memerlukan usaha yang keras untuk mensejahterakan masyarakatnya. Dengan meningkatkan belanja pemerintah pada bidang pendidikan dan kesehatan, dan diiringi dengan pendapatan perkapita yang semakin naik, peningkatan laju pembangunan manusia sudah seharusnya juga dapat meningkat secara signifikan sebesar peningkatan alokasi pengeluaran serta kenaikan pendapatan per kapita.

Dari uraian-uraian diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“ANALISIS KORELASI ANGGARAN PENDIDIKAN, ANGGARAN KESEHATAN DAN PENDAPATAN PER KAPITA TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI INDONESIA TAHUN 2010-2018**

B. Identifikasi Masalah

Pembangunan manusia merupakan salah satu indikator bagi kemajuan suatu negara dimana pembangunan suatu

negara tidak bisa dikatakan berhasil apabila hanya melihat dari besarnya pendapatan domestik bruto saja tanpa meningkatkan pembangunan manusianya. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan penelitian.

1. Pengeluaran pemerintah sebesar 20% tidak dialokasikan semuanya untuk pendidikan tetapi juga dialokasikan untuk hal lainnya, seperti gaji pegawai dan biaya pendidikan lainnya.
2. Permasalahan yang dihadapi setiap wilayah yaitu pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan yang tidak merata. Pengeluaran pemerintah untuk alokasi pendidikan dan kesehatan harus benar-benar teralokasikan karena dengan hal tersebut akan meningkatkan kualitas SDM yang akan meningkatkan perekonomian suatu wilayah.
3. Kemampuan masyarakat secara keseluruhan belum mendukung untuk menjadi tenaga ahli dibidang tertentu akibat dari ketidakmampuan dalam memperoleh pendidikan dan hidup sehat.
4. Mengalami fluktuasi pada anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan pendapatan per kapita.
5. Anggaran pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita pada periode 2010-2018 selalu mengalami peningkatan dan dapat meningkatkan nilai Indeks Pembangunan Manusia namun sampai saat ini negara Indonesia belum menempati ranking teratas.

C. Pembatasan Masalah

Batasan masalah ini diperlukan supaya permasalahan tak meluas dan meyimpang dari permasalahan yang sudah dirumuskan penulis. Maka dalam penelitian ini penulis membatasi variabel-variabel yang akan dijadikan objek penelitian. Untuk variabel dependen yaitu Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan variabel independennya yaitu anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan pendapatan per kapita. Periode penelitian dimulai pada tahun 2010 sampai dengan 2018.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena pada latar belakang masalah diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana korelasi anggaran pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018?
2. Bagaimana korelasi anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018?
3. Bagaimana korelasi pendapatan per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018?
4. Bagaimana korelasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan pendapatan per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis korelasi anggaran pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018.
2. Menganalisis korelasi anggaran kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018.
3. Menganalisis korelasi pendapatan per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018.
4. Menganalisis korelasi anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan pendapatan per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Tahun 2010-2018.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan memperdalam pengetahuan ilmu serta wawasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia guna melakukan evaluasi dan melakukan perubahan-perubahan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini merupakan pengetahuan baru tentang Indeks Pembangunan Manusia. Diharapkan penelitian ini

dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan sebagai referensi atau acuan untuk pihak yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut.

3. Bagi Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan pemerintah dalam hal mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dengan paradigma Indeks Pembangunan Manusia.

G. Kerangka Pemikiran

Untuk menilai maju tidaknya suatu negara tidak hanya ditentukan oleh tingginya tingkat ekonomi suatu negara, tapi harus ditambah pula bahwa kemajuan atau kekuatan ekonomi itu harus merupakan hasil kreasi manusia warga negara yang bersangkutan. Negara kaya adalah yang kekayaannya dihasilkan oleh kreasi manusia warga negaranya. Tetapi kalau kekayaan suatu negara tidak dihasilkan oleh manusia, tidak dikatakan sebagai negara kuat atau maju dari segi ekonomi. Negara yang kaya dengan sumber daya alam, tapi rendah kualitas sumber daya manusia, seperti negara-negara Arab penghasil minyak dan Indonesia, tidaklah dianggap negara maju. Maka maju tidaknya suatu negara didasarkan kepada pertimbangan tinggi rendahnya kualitas sumber daya manusia⁶.

Pembangunan manusia tidak akan terlepas dari peningkatan pendidikan dan hidup sehat. Seseorang yang

⁶ Bustanuddin Agus, *Islam dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), h.27

berpendidikan tinggi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam kehidupannya dibandingkan dengan orang yang pendidikannya lebih rendah. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan dibidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Kukles dan Smith menyatakan bahwa pendidikan adalah cara efektif untuk membentuk manusia yang modern⁷.

Teori pertumbuhan endogen (*endogeneous growth theory*) menjelaskan bahwa investasi pada modal fisik dan modal manusia berperan dalam menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan mendorong peran aktif kebijakan publik dalam merangsang pembangunan ekonomi melalui investasi langsung maupun tidak langsung dalam pembentukan sumber daya manusia. Pemerintah di negara berkembang sudah seharusnya memberikan perhatian yang besar terhadap pendidikan. Kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan melalui pengaruhnya dalam melakukan perubahan konsumsi atau pengeluaran untuk investasi publik dan penerimaan dari pajak.

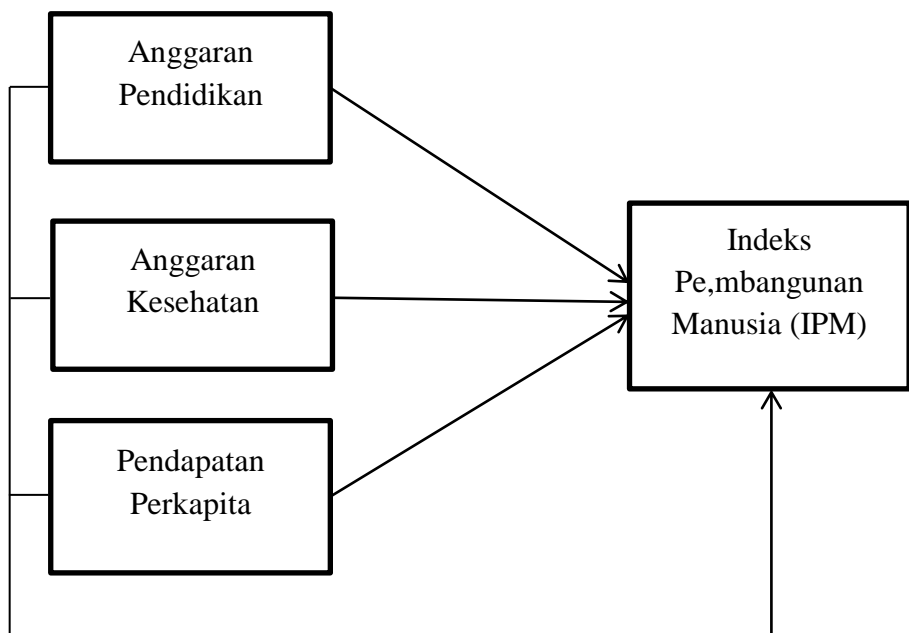
Produktivitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh tingkat kesehatan yang berpengaruh pada keberhasilan tingkat pendidikan dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, kesehatan juga dapat dilihat sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital atau yang dikenal sebagai input fungsi produksi agregat.

⁷ Wildani Pingkan, *Menuju Masa Depan Pembangunan di Indonesia antara Teori dan Realita Lokal*, (Bogor: Labdawara, 2001), h.

Pendapatan per kapita menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, ketika pendapatan meningkat maka kehidupan masyarakat semakin meningkat. Pendapatan yang tinggi membuat masyarakat mampu untuk memenuhi kebutuhan makanan dan non-makanan. Masyarakat dapat mengakses pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan baik. Hal tersebut akan mempengaruhi naiknya capaian Indeks Pembangunan Manusia.

Pendidikan, hidup sehat dan pendapatan per kapita merupakan hal-hal yang dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia, dapat dilihat melalui gambar dibawah ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Gambar 1.1 tersebut menjelaskan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Ketika pengeluaran pemerintah bidang pendidikan naik, maka Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat. Begitu pula pada pendapatan per kapita, ketika pendapatan per kapita naik, tingkat pembangunan manusia pun ikut meningkat. Yang artinya pertumbuhan ekonomi meningkat dan masyarakat semakin sejahtera.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari lima bab atau bagian yaitu bab I Pendahuluan, bab II Tinjauan Pustaka, bab III Metode Penelitian, bab IV Pembahasan Hasil Penelitian dan Pembahasan dan bab V Penutup. Untuk masing-masing isi setiap bagian adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, bab ini membahas tentang kajian pustaka yang akan membahas teori-teori meliputi Indeks pembangunan manusia, anggaran pendidikan, anggaran kesehatan dan pendapatan per kapita.

Bab III : Metodologi Penelitian, bab ini menguraikan secara rinci mengenai waktu dan tempat penelitian, jenis

metode penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dan operasional variabel penelitian.

Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini membahas uraian hasil penelitian berupa temuan-temuan dari penelitian yang telah dilakukan dengan disertai pembahasan analisis dan terpadu.

Bab V : Penutup, bab ini membahas tentang kesimpulan mengenai objek yang diteliti berdasarkan hasil analisa data dan memberikan saran untuk pihak-pihak yang terkait.